



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
SEKRETARIS DAERAH**

**PROVINSI PAPUA BARAT
DAN TRANSFER FISKAL EKOLOGIS:
TANTANGAN, KOMITMEN DAN ASPIRASI**

*(DISAMPAIKAN PADA KONFERENSI TRANSFER FISKAL EKOLOGIS DAN
PELUNCURAN LAPORAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN
AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (AIPI), AKADEMI ILMUWAN
MUDA INDONESIA (ALMI), DAN WORLD RESOURCES INSTITUTE (WRI)
INDONESIA
JAKARTA, 01 AGUSTUS 2019)*

SYALLOM!

ASSALAMU 'ALAIKUM WA RAKHMATULLAHI WA
BARAKATUH,
OM SWASTIASTU,
NAMO BUDDHAYA,
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA,
SELAMAT PAGI,

YANG TERHORMAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA,
YANG SAYA HORMATI KETUA DAN ANGGOTA AKADEMI
ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,
YANG SAYA HORMATI DIREKTUR WRI INDONESIA,
YANG SAYA HORMATI DIREKTUR JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENTERIAN
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
YANG SAYA HORMATI DIREKTUR JENDERAL OTONOMI
DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIA,
YANG SAYA HORMATI DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI
SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
HIDUP REPUBLIK INDONESIA,
PARA BUPATI DARI KABUPATEN LUWU, KABUPATEN
BERAU, KABUPATEN ACEH TENGAH, KABUPATEN
SORONG SELATAN DAN KABUPATEN SINTANG
YANG HADIR,
JUGA PARA NARASUMBER YANG SAYA HORMATI,
BAPAK, IBU, PARA HADIRIN SEKALIAN YANG SAYA
HORMATI, KASIHI DAN BANGGAKAN,

PERTAMA-TAMA SAYA INGIN MENGAJAK KITA SEMUA
UNTUK BERSYUKUR KEPADA TUHAN YANG MAHA
KUASA, KARENA PERKENAN-NYA SEHINGGA KITA

SEMUA DAPAT BERKUMPUL DI SINI DALAM SUASANA PENUH KEDAMAIAN DAN PENUH KEAKRABAN. SUATU KEHORMATAN DAN KEPERCAYAAN LUAR BIASA BAGI KAMI DI TANAH PAPUA, TERUTAMA PROVINSI PAPUA BARAT MENERIMA KEHORMATAN SEBAGAI NARASUMBER DALAM FORUM ILMIAH YANG SANGAT TERHORMAT DI AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA DI SINI. UNTUK ITU ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH DAN SELURUH MASYARAKAT DI PROVINSI PAPUA BARAT MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH. DAN PADA KESEMPATAN INI JUGA SAYA MENYAMPAIKAN PERMOHONAN MAAF DAN SALAM HORMAT BAPAK GUBERNUR SECARA KHUSUS BUAT IBU MENTERI KEUANGAN DAN SEMUA YANG HADIR.

IBU MENTERI DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

TANAH PAPUA YANG MERUPAKAN WILAYAH SEBELAH BARAT PULAU NEW GUINEA ADALAH DAERAH OTONOMI KHUSUS BAGIAN INTEGRAL DARI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. SECARA ADMINISTRATIF, DAERAH OTONOMI KHUSUS INI TERBAGI KE DALAM DUA PEMERINTAHAN PROVINSI,

YAITU PROVINSI PAPUA DENGAN LUASAN 319.036 KM² DAN PROVINSI PAPUA BARAT DENGAN LUASAN WILAYAH **140.376 KM²**.

PAPUA BARAT DENGAN LUAS HUTAN SEKITAR **9.713.137** HEKTAR, BERKONTRIBUSI SEBESAR **8,12%** TERHADAP LUAS HUTAN HUJAN TROPIS INDONESIA. HUTAN TROPIS PAPUA BARAT, SEBAGIAN BESAR ADALAH HUTAN PRIMER, MENUTUPI **90%** WILAYAH PROVINSI KAMI. TERMASUK HUTAN **MANGROVE SELUAS 481.237,01 HEKTAR** DAN **HUTAN GAMBUT SELUAS 541.359,92 HEKTAR**.

SELAIN ITU, HUTAN PAPUA BARAT DIPERKIRAKAN JUGA MENYIMPAN **1.323 JUTA METRIK TON KARBON** YANG AKAN BERMANFAAT BAGI UMAT MANUSIA JIKA DIJAGA DENGAN BAIK UNTUK MENGENDALIKAN PERUBAHAN IKLIM DUNIA. DAN AKAN BERKONTRIBUSI BESAR DALAM PENCAPAIAN TARGET NASIONAL (NDC) INDONESIA SESUAI PERJANJIAN PARIS.

EKSOSISTEM HUTAN DI WILAYAH PAPUA BARAT TIDAK HANYA KAYA AKAN KEANEKARAGAMAN HAYATI, TETAPI JUGA MERUPAKAN SUMBER INSPIRASI BUDAYA DAN

KEHIDUPAN BAGI MASYARAKAT ADAT. TERCATAT SEKITAR **265 BAHASA LOKAL (62 BAHASA DI PAPUA BARAT)** YANG MELAMBANGKAN SUKU-SUKU YANG ADA DENGAN KEARIFAN LOKALNYA.

PERAIRAN PAPUA BARAT JUGA MEMILIKI TERUMBU KARANG ASLI TERBAIK DENGAN JUMLAH SPESIES IKAN KARANG DAN KARANG KERAS SEKITAR **75% DARI IKAN KARANG DAN KARANG KERAS DUNIA.**

NAMUN TENTUNYA JUGA ADA **TANTANGAN** YANG SEDANG DIHADAPI OLEH KAMI DI PROVINSI PAPUA BARAT. SEKITAR **1,1 JUTA** PENDUDUK PAPUA BARAT MENGGANTUNGAN HIDUP PADA SUMBER DAYA ALAM PAPUA BARAT YANG KAYA INI. NAMUN, **SEKITAR 25%** PENDUDUK DI PAPUA BARAT MASIH TERKATEGORI MISKIN BERDASARKAN **INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA**. IRONISNYA, PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT MENJADI **PROVINSI TERMISKIN** DI INDONESIA SEKALIPUN HIDUP DI ATAS TANAH DAN HUTAN SERTA MINERAL YANG KAYA. BELUM TERBENTUKNYA SISTEM YANG MEMADAI, INFRASTRUKTUR YANG KURANG DAN RENDAHNYA KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA MENJADI TANTANGAN TERSENDIRI DALAM

MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.

IBU MENTERI DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT PAPUA BARAT SANGAT BERKOMITMEN MENJAGA ALAM PAPUA BARAT. INI DAPAT DILIHAT DENGAN SALAH SATU VISI PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT **“MEWUJUDKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN”**. SAAT INI ADA SEKITAR **25 KAWASAN KONSERVASI DATARAN DAN 11 HUTAN LINDUNG**, DENGAN **LUAS 3,3 JUTA HEKTAR ATAU 32% LUAS DARATAN**. ADA SEKITAR **17 KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAN LAUT DENGAN LUAS TOTAL SEKITAR 4,5 JUTA HEKTAR**. HAMPIR SEMUA KAWASAN INI MASIH DALAM KEADAAN BAIK DAN MERUPAKAN SUMBER DAN CADANGAN PANGAN PENTING BAGI MASYARAKAT PAPUA.

IBU MENTERI DAN PARA HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

SESUAI DENGAN VISI DAN MISI PEMERINTAH DAERAH, KOMITMEN BAPAK GUBERNUR, PARA BUPATI DAN SELURUH RAKYAT UNTUK MENJADIKAN PROVINSI PAPUA BARAT MENJADI **PROVINSI BERKELANJUTAN**

ATAU PROVINSI KONSERVASI AKAN TERUS BERLANJUT. KAMI DENGAN DUKUNGAN BERBAGAI PIHAK, TELAH BERHASIL MELAKSANAKAN KONFERENSI INTERNASIONAL KEANEKARAGAMAN HAYATI, EKOWISATA DAN EKONOMI KREATIF (ICBE) 2018, YANG MELAHIRKAN DEKLARASI MANOKWARI YANG MEMUAT 14 KESEPAKATAN DAN KOMITMEN DAN MENJADI BABAK BARU DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI TANAH PAPUA DENGAN DISAHKANNYA PERATURAN DAERAH KHUSUS (PERDASUS) TENTANG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI TANAH PAPUA, DIMANA MENEGASKAN KEMBALI KOMITMEN MENGAKOMODIR MINIMAL 70% LUAS DARATAN DAN 50% LUAS PERAIRAN SEBAGAI KAWASAN LINDUNG. UPAYA-UPAYA TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN MELALUI BEBERAPA HAL BERIKUT:

- **MENINGKATKAN UPAYA PENCEGAHAN DEFORESTASI DENGAN MENINJAU KEMBALI PROSES PERIZINAN DAN MEMPERKUAT PENATAAN RUANG YANG LEBIH PRO-LINGKUNGAN DAN MELIBATKAN PEMERINTAH DAERAH SERTA MASYARAKAT ADAT.**
- **MEMPERLUAS DAN MENINGKATKAN PENGELOLAAN KAWASAN PERLINDUNGAN ALAM BAIK HUTAN, LAUT DAN KAWASAN PENTING BAGI MASYARAKAT ADAT.**
- **MENDORONG PENGAKUAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT ATAS KEPEMILIKAN LAHAN DAN HUTAN ADAT.**

- MENGEMBANGKAN DAN MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU, SERTA PEMANFAATAN JASA-JASA LINGKUNGAN, DIMANA PARIWISATA MERUPAKAN SALAH SATU **LEADING SECTOR** BAGI PERTUMBUHAN EKONOMI BERKELANJUTAN.
- MENGUSULKAN POLA ATAU MEKANISME FISKAL TRANSFER BERDASARKAN KOMITMEN DAN KINERJA MENJAGA HUTAN ATAU LUASAN TUTUPAN HUTAN, SEPERTI YANG KITA LAKUKAN PADA SAAT INI.
- MENDUKUNG PEMBATASAN PENGIRIMAN KAYU BULAT KE LUAR PAPUA BARAT SAMBIL MENKKAJI SERTA MEMPERTIMBANGKAN PERLINDUNGAN TOTAL UNTUK EKOSISTEM MANGROVE DAN GAMBUT DI PAPUA BARAT.
- MEMPERKUAT SUMBER DAYA MANUSIA DI PAPUA BARAT UNTUK MEMBERANTAS *ILLEGAL LOGGING* DAN PENEGAKAN HUKUM SECARA LUAS DALAM KASUS PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN, TERMASUK PEMBATASAN DAN PENGHAPUSAN PENGGUNAAN KEMASAN DAN KANTONG BERBAHAN PLASTIK.
- MENDORONG PENGGUNAAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN DALAM MEMACU PEMBANGUNAN DI DAERAH TERPENCIL DAN TERISOLASI.

IBU MENTERI, BAPA/IBU SEKALIAN YANG SAYA HORMATI,

SAAT INI KAMI SEDANG MEREVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI (RTRWP) PAPUA BARAT UNTUK MENGAKOMODIR PENINGKATAN **PERSENTASI LUASAN KAWASAN BERFUNGSI LINDUNG DARI YANG SAAT INI SEKITAR 32% MENJADI MINIMAL 70% DARI LUAS DARATAN PROVINSI PAPUA BARAT.** DAN RENCANA ZONASI WILAYAH PERAIRAN DAN PULAU-PULAU KECIL (RZWP3K) YANG TELAH MENGAKOMODIR 50% PERAIRAN PROVINSI PAPUA BARAT DENGAN MENETAPKAN SEKITAR 2,5 JUTA HEKTAR KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH.

SECARA KHUSUS UNTUK INSENTIF PENDANAAN, PADA RAPAT KERJA BUPATI/WALIKOTA SE-PAPUA BARAT DI TEMINABUAN, KABUPATEN SORONG SELATAN DI HASILKAN KESEPAKATAN YANG DIKENAL DENGAN **ASPIRASI TEMINABUAN:**

PERTAMA: MENEGASKAN KOMITMEN BERSAMA UNTUK MENGAKOMODIR MINIMAL 70% LUAS DARATAN SEBAGAI KAWASAN LINDUNG YANG TERMUAT DALAM PERDASUS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI PROVINSI PAPUA BARAT.

KEDUA: DIPERLUKAN SEBUAH KEBIJAKAN NASIONAL BERUPA MEKANISME TRANSFER FISKAL BERDASARKAN

KOMITMEN UNTUK MENJAGA KELESTARIAN HUTAN/LUASAN TUTUPAN HUTAN SEBAGAI KRITERIA/INDIKATOR DALAM PERHITUNGAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) SEBAGAI PENGHARGAAN (INSENTIF) TERHADAP MASYARAKAT ADAT DAN PEMERINTAH DAERAH YANG TELAH MELINDUNGI DAN MELESTARIKAN HUTAN.

KETIGA: MEMINTA KEPADA **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA** UNTUK MENGAKOMODIR ASPIRASI INI SEBAGAI SEBUAH TEROBOSAN KEBIJAKAN ATAU SUMBANGSIH INOVASI DAN KOMITMEN KAMI DARI PAPUA BARAT UNTUK MENJAGA HUTAN DI TANAH PAPUA UNTUK MASA DEPAN INDONESIA DAN DUNIA.

KEEMPAT: MEMPERCEPAT PROSES PENGAJUAN **DANA ALOKASI UMUM (DAU)** SEBAGAI USULAN INSTRUMEN TRANSFER FISKAL DENGAN INDIKATOR **LUAS TUTUPAN HUTAN (FOREST COVER)** BERUPA LUAS HUTAN PRIMER DAN SEKUNDER.

KELIMA: MEMINTA DUKUNGAN BERBAGAI PIHAK BAIK PEMERINTAH MAUPUN MITRA PEMBANGUNAN UNTUK PENYIAPAN PELAKSANAAN (PRAKONDISI) KEBIJAKAN INI DALAM SEMUA ASPEK TERMASUK PENYIAPAN SISTEM DAN KELEMBAGAAN.

IBU MENTERI, BAPA/IBU SEKALIAN YANG SAYA HORMATI,

AKHIRNYA,

DAN SEBAGAI KATA PENUTUP SAYA INGIN MENGATAKAN BAHWA TUGAS KITA ADALAH **“MEWARISKAN MATA AIR BAGI ANAK CUCU KITA BUKAN SEBALIKNYA MEWARISI AIR MATA BAGI MEREKA”**.

SEMOGA TUHAN YANG MAHA KUASA SELALU MENYERTAI KITA....

MEMBANGUN DENGAN HATI, MEMPERSATUKAN DENGAN KASIH...

DARI PAPUA BARAT - INDONESIA UNTUK DUNIA YANG LEBIH BAIK.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH.

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT**

DRS. NATANIEL D. MANDACAN, M.SI